

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya (Pendit, 2003:33).

Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sektor unggulan dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan. Pariwisata dengan berbagai aspek positif, dipandang sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non-polluting* umumnya hanya diperlakukan sebagai sebuah ‘industri’, dan hal mana yang berimplikasi pada pengembangan pendidikan pariwisata yang menekankan pada pembelajaran pada aspek *technical know-how*, sementara sisi *know-what dan know-why* masih relatif tertinggal¹. Kondisi ini juga terjadi pada tempat-tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Malang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan melalui pemeliharaan kelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan upaya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup yang merupakan daya tarik wisata, untuk itu pengusahaan di bidang kepariwisataan perlu pengaturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Malang.

Berbagai macam obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Malang dan dapat dikelompokkan menurut jenis wisatanya. Yaitu wisata hiburan yang mengutamakan obyek wisata hiburan untuk anak-anak dan keluarga

¹Pengantar ilmu pariwisata/ I. Gede Pitana dan I Ketut Surya Dirda; Yogyakarta: ANDI; hal 2.)

seperti Taman Burung Malang, Pemandian Metro, Pemandian Dewi Sri dan masih banyak lagi yang lainnya. Wana Wisata mengutamakan obyek wisata yang berhubungan dengan alam sekitar seperti Gunung Bromo, Air Terjun Coban Rondo, Air Terjun Coban Pelangi dan sebagainya. Wisata Budaya mengutamakan obyek wisata yang berhubungan sejarah dan budaya Kabupaten Malang, seperti Candi Singosari, Candi Badut, serta tempat-tempat ritual seperti Pesarean Gunung Kawi. Wilayah selatan Kabupaten Malang dikenal pula dengan Wisata pantainya.

Cukup banyak pantai yang ada di Kabupaten Malang seperti Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Sendang Biru dan masih banyak lagi. Disamping itu Kabupaten Malang dikenal pula dengan wisata tirta salah satunya Bendungan Selorejo. Agro Wisata juga terdapat di Kabupaten Malang. Ada 1 daerah yang potensial yaitu Agro Wisata Kebun Teh Wonosari Lawang. Berbagai tempat wisata tersebut memiliki potensi yang besar dalam upaya peningkatan daerah.

Salah satu potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Malang yaitu Taman Wisata Bendungan Selorejo, Obyek wisata ini menawarkan keindahan alam yaitu berupa danau buatan. Potensi wisata yang dimiliki oleh taman wisata tersebut memberikan dukungan dalam upaya untuk peningkatan PAD. Apabila dikaitkan dengan kontribusi dari tempat wisata terhadap PAD yaitu, dengan keberadaan tempat wisata tersebut maka akan memberikan pendapatan bagi daerah terkait dengan pendapatan retribusi daerah.

Kabupaten Malang yang merupakan daerah terluas di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, banyak ditemukan tempat wisata yang sangat layak menjadi tempat perayaan tahun baru. Kabupaten Malang memiliki 48 lokasi wisata alam. Diantara tempat wisata itu adalah wisata Air Terjun Coban Pelangi, Air Terjun Coban Rondo, Air Terjun Coban Glotak, Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Sendang Biru, Pantai Tamban, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Bajul Mati.

Aneka keindahan pantai memang menjadi salah satu obyek wisata terindah yang ada di Kabupaten Malang. Wisatawan yang datang, tak hanya dari Malang, tapi luar Malang, bahkan mulai banyak dikunjungi wisatawan asing. Beberapa pantai itu adalah Pantai Goa China, Pantai Wonogoro, Pantai Modangan, Pantai Kondang Merak, Pantai Sipelot, Pantai Licin, Pantai Tambak Asri, Pantai Rawa Indah, Pantai Lenggasono dan Pantai Kondang Merak serta masih banyak lagi tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Malang (malangtimes.com)

Taman Wisata Bendungan Selorejo merupakan salah satu tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Malang. Keberadaan tempat wisata tersebut bagi masyarakat yang tinggal disekitar taman wisata yaitu memberikan dukungan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat (Yoeti, 1994). Keberadaan atau ketentuan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi cukup tinggi dimana telah ditetapkan hanya masyarakat yang tinggal disekitar bendungan yang dapat melakukan aktivitas penjualan. Adapun untuk mengetahui potensi yang dimiliki Taman Wisata Bendungan Selorejo apabila ditinjau dari penerimaan tempat wisata dan penginapan dapat disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Potensi Wisata Taman Wisata Bendungan Selorejo
di Kabupaten Malang

Tahun	Jumlah Pengunjung
2008	195.317
2009	226.471
2010	187.108
2011	208.605
2012	178.426
2013	180.024
2014	129.885

Sumber : Kepariwisata Kabupaten Malang Tahun 2015

Tabel 1.1 menunjukkan adanya potensi Taman Wisata Bendungan Selorejo yang cenderung mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan belum maksimalnya atas pemanfaatan atau tata kelola atas potensi wisata yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut. Tata kelola untuk akses jalan ke tempat wisata masih perlu adanya perbaikan serta sarana dan prasarana serta fasilitas pengalaman lokasi-lokasi yang berbahaya belum dilakukan secara maksimal. Permasalahan yang ada yaitu terkait dengan infrastruktur yang terdapat di Taman Wisata Bendungan Selorejo. Kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fasilitas jalan yang kurang memenuhi yaitu banyak jalan ke lokasi rusak sehingga mengakibatkan akses menuju taman wisata agak sulit.

Pengelola perusahaan (Pariwisata Bendungan Selorejo) tersebut dikelola oleh Perum Jasa Tirta, dimana Perum Jasa Tirta berwenang untuk mengelola dan mengembangkan industri pariwisata Bendungan Selorejo. Perum Jasa Tirta di Selorejo dibagi atas dua divisi, yang pertama adalah divisi pemeliharaan yang bertugas sebagai pengatur air dan Bendungan, yang ke dua divisi pariwisata (PATA), yang berfungsi sebagai pengatur fasilitas

pariwisata. Perum Jasa Tirta di Selorejo tersebut berada dibawah naungan Perum Jasa Tirta pusat yang berada di Kota Malang. didalam mengelola, Perum Jasa Tirta mempunyai tujuan untuk menjadikan Obyek Wisata Bendungan Selorejo sebagai salah satu obyek unggulan di Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan tempat wisata tersebut memiliki ciri khas tersendiri, selain tempatnya yang luas, udara yang masih sejuk, dan fasilitas yang lengkap, maka Wisata Bendungan Selorejo mampu bersaing dengan wisata-wisata lain di Indonesia.

Adapun perencanaan pengembangan pada sektor pariwisata pasti mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang cukup memberikan tantangan tersendiri dalam penerapannya, hambatan tersebut muncul atau dikarenakan adanya permasalahan dalam proses pengembangan itu sendiri. Permasalahan utama adalah kelemahan-kelemahan yang ada, baik dari intern maupun ekstern, yang dimaksud dengan kelemahan intern yaitu kelemahan yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri yang berupa masalah kurangnya dana untuk pengembangan fasilitas wisata dan masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) staf karyawan yang kurang mampu untuk menguasai bidang pariwisata.

Kelemahan ekstern adalah kelemahan yang datang dari luar masalah perusahaan yaitu adanya masyarakat setempat yang kurang mendukung, dalam hal keikutsertaannya untuk memelihara sangat kurang. Kondisi ini ditunjukkan kurang pedulinya masyarakat setempat dalam menjaga keberadaan tempat wisata, terutama dalam menjaga kebersihan tempat wisata.

Hal ini menjadikan tempat wisata kelihatan kumuh dan kurang terawat, terutama keberadaan sampah-sampah yang terdapat disekitar lokasi wisata. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh tempat wisata ini. Berdasarkan latar belakang yang demikianlah dalam proposal ini peneliti menggunakan judul **“Kinerja Perum Jasa Tirta Dalam Tata Kelola Taman Wisata Bendungan Selorejo ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa poin yang dapat penulis tarik sebagai rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Perum Jasa Tirta dalam tata kelola pariwisata di Taman Wisata Bendungan Selorejo?
2. Apakah faktor penghambat kinerja Perum Jasa Tirta dalam tata kelola pariwisata di Taman Wisata Bendungan Selorejo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja Perum Jasa Tirta dalam tata kelola pariwisata di Taman Wisata Bendungan Selorejo
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja Perum Jasa Tirta dalam tata kelola pariwisata di Taman Wisata Bendungan Selorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

- 1) Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber literatur di kampus khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
- 2) Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi ilmiah dalam memperkaya wawasan teori serta konsep mengenai sektor pariwisata dan kebudayaan.

2. Manfaat praktis.

- 1) Sebagai titik acuan pemerintah selanjutnya dalam sektor pariwisata dan kebudayaan.
- 2) Untuk mendeskripsikan peranan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang.
- 3) Dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Dinas Jasa Tirta dalam memperbaiki kinerja.

E. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur atau bagian dalam penelitian dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena². Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam

²Singarimbun, Masri 1982. *Metode penelitian survey*. Jakarta:LP3ES. Hal 17)

permasalahan yang disajikan. Dengan adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam penelitian³. Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (*pasal 13 ayat 1 UU No. 5/1974*). Di sini jelas pengertian pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah bukanlah eksekutif saja sebagaimana kalau kita lihat pemisahan kekuasaan menurut Montesque yang terkenal dengan Trias Politika. Menurut Montesque kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga : (1) Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2) Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah, dan (3) Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh Badan Peradilan.

Namun antara teori Montesque ketika disetarakan dengan undang-undang tidak lagi berlaku, sebab di sini dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah (Eksekutif) dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Walaupun pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tetapi DPRD tidak dapat mencampuri bidang eksekutif sebab bidang eksekutif merupakan wewenang dan tanggung jawab dari kepala daerah. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas.

³(Hamidi.2004.*Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang :Umm Pres.hal 19).

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para pegawai negeri sipil sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segalanya jadi serba salah. Terlalu sering para pegawai tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi dalam suatu instansi pemerintahan menghadapi krisis yang serius⁴.

Pengukuran kinerja merupakan instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah

⁴Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati
3. Memonitor dan megevaluasi pelaksanaa kinerja dan membandingkan dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja yang telah disepakati
4. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
5. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
8. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
9. Mengungkap permasalahan yang terjadi

Indikator terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuan memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka yang digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan beberapa tipe indikator kinerja. Ada beberapa tipe indikator kinerja yaitu kualitatif, kuantitas absolut, persentase, rasio, rata-rata, dan indeks. Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. *The University of California* menggunakan tes SMART yang merupakan lima kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja, yaitu:

- a. S=Spesific. Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi harus disertakan harus mudah diinterpretasikan.
- b. M=Measurable. Indikator kinerja harus dapat dikuantifikasikan dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif. Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dapat dianalisis secara statistik.
- c. A=Attainable. Indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja.
- d. R=Realistic. Sama halnya dengan kriteria “dapat dicapai”. Indikator kinerja yang ditetapkan harus juga mempertimbangkan keterbatasan organisasi untuk mencapainya termasuk yang terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. “R” dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkan kepada Relevan. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi.
- e. T=Timely. (Ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Penentuan indikator-indikator di atas ke dalam masing-masing kelompoknya (input, output, *outcome*, *benefit*, *impact*) sangat tergantung pada bentuk kebijakan yang diberlakukan, jenis program, dan jenis kegiatannya.

2. Tata Kelola Pariwisata

Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Mulai dari yang bersifat top-down, bottom-up, hingga kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut pada umumnya masih berbasis proyek dalam penyelesaian tahun anggaran berjalan. Paradigma lama yang dijalankan tidak didekatkan dengan inti dari pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sering kali diidentikkan dengan pembangunan fisik semata. Wajar jika satu-dua tahun kemudian ditemui hasil pembangunan fisik di lokasi-lokasi pariwisata telah rusak dan tidak berfungsi lagi. Ada empat dimensi utama dari pariwisata, yaitu atraksi, fasilitas, transportasi, dan keramahtamahan. Atraksi erat kaitannya dengan alasan seseorang untuk datang ke kawasan wisata. Sumber atraksi biasanya berasal dari alam, budaya, etnisitas, ataupun hiburan.

Atraksi membuat pengunjung mendatangi lokasi tujuan wisata, fasilitaslah yang melayani selama berada di sana. Mill menyatakan bahwa dukungan fasilitas bukanlah memulai, tapi menumbuhkan sebuah tempat tujuan wisata. Adapun transportasi identik dengan bagaimana orang atau sekelompok orang melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda (tujuan destinasi). Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang lebih baik. Keramahtamahan sebuah kawasan diakui Mill sebagai perasaan yang

timbul dari aktivitas atas penyambutan baik yang diterima wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan. Sesuai dengan UU No 10/2009 tentang Kepariwisata, destinasi pariwisata dimaksudkan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Konsep itu mengandung arti bahwa destinasi wisata tidak mengenal pembatasan secara wilayah administratif, karena bisa saja objek berada di dua atau lebih wilayah administratif, sehingga dalam tata kelola destinasi haruslah menggunakan pendekatan fungsional dengan melihat kemanfaatan dan nilai tambah yang diberikan suatu objek terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

a. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran

Jika merujuk pada Undang-Undang No.9 tahun 1990 mengenai kepariwisataan Bab I, pasal 1: di jelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata. Pariwisata merupakan konsep yang sangat dimensional layaknya pengertian wisatawan. Tak bias dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh beberapa ahli mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

Salah Wahab (1975:55) : *"pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi"*

"the sum of phenomena dan relationships arising from the interaction of tourist, businesses, host governments and host communities, in the process of attracting and hosting these tourists and other visitor" (MacIntosh, 1980 : 8)

Wahab dalam Yoeti (1994, 116.) *"Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap"*.

Pengertian pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli, hal yang memang jamak terjadi dalam dunia akademis, sebagaimana juga bias ditemui pada berbagai disiplin ilmu lain. Meskipun ada variasi

batasan, ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional).

3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variable diobservasi atau diukur. Menurut Wisadirman, (2005), metode penelitian dan penulisan skripsi untuk ilmu sosial. Definisi operasional variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja yaitu sejauh mana gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan suatu unit kerja dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator dari kinerja yaitu meliputi:
 - a) Kecepatan dan ketepatan pelayanan di wisata bendungan Selorejo
 - b) Kenyamanan pelayanan dalam tata kelola di wisata bendungan Selorejo
 - c) Sumber daya pegawai yang kompeten dalam tata kelola di wisata bendungan selorejo
 - d) Kuantitas sumber daya pegawai yang memadai
 - e) Pelibatan masyarakat dalam tata kelola pariwisata
 - f) Pelibatan stakeholder dalam kelola pariwisata.
2. Faktor penghambat kinerja Dinas Jasa Tirta di Taman Wisata Bendungan Selorejo, dengan indikator yaitu sebagai berikut:
 - a. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pengelolaan Taman Wisata Bendungan Selorejo
 - b. Kurang partisipasi masyarakat
 - c. Kurangnya potensi Taman Wisata Bendungan Selorejo

- d. Terbatasnya anggaran atau dana pengelolaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur tentang cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sehingga harapan kedepannya dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang akan digunakan dengan teknik-teknik dalam pengumpulan data.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang terjadi secara alamiah maupun fenomena buatan manusia sendiri. Fenomena itu bias berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari dua aspek, sebagai berikut:

a. Data primer.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yaitu dengan turun langsung ke lapangan mencari informasi kepada pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait lainnya di Kabupaten Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, serta melakukan pengumpulan beberapa keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti melalui referensi buku-buku, perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal-jurnal lokal, artikel dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan ke dinas pariwisata kabupaten Malang, lembaga adat dan kebudayaan kabupaten Malang serta pemerintah daerah kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah dan telah diolah oleh orang lain sebelumnya. Peneliti hanya tinggal memanfaatkan data yang sudah tersaji tersebut. Dalam penelitian ini dokumentasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dari lembaga serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Malang.

c. Wawancara / interview

Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden, dalam hal ini secara otomatis adalah kepala lembaga serta instansi yang terkait. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pihak yang diwawancara menjawab sesuai pendapat serta ide-idenya.

4. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian menjadi hal yang sangat penting di dalam penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan subjek penelitian dalam hal ini adalah orang-orang (*informan*) yang sekiranya dianggap dapat memberikan informasi tentang kebudayaan, pariwisata, serta peran pemerintah setempat dalam dua sektor tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat dilakukannya penelitian ini di Kabupaten Malang. Penelitian di Kabupaten Malang ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan atas pertimbangan bahwa sektor pariwisata kabupaten Malang yang bersangkutan mengalami perubahan. Sektor pariwisata yang mengalami penurunan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Penelitian di dilakukan pada Dinas Jasa Tirta Kabupaten Malang didasari atas peran penting dinas terkait dalam mengemban amanat sebagai pengelola sektor pariwisata kabupaten setempat. Merupakan

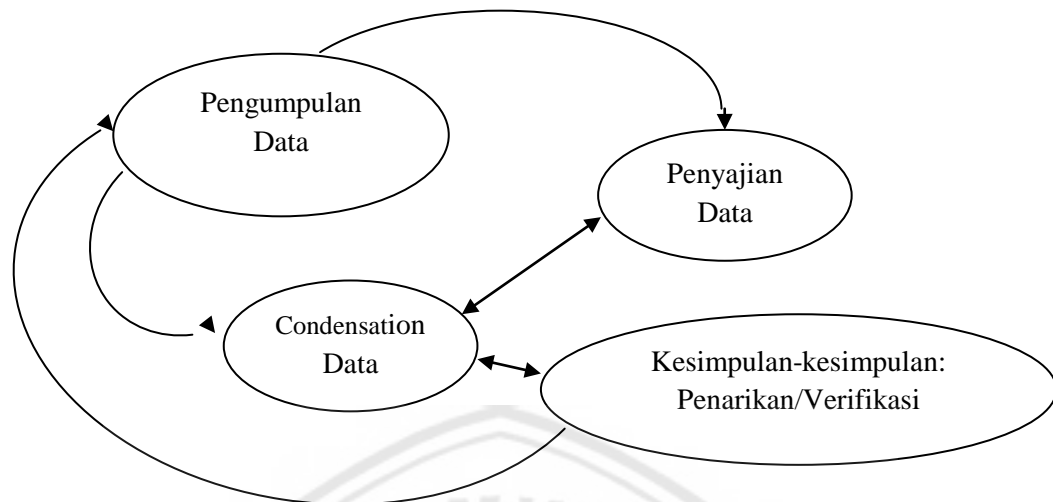
tanggungjawab moral bagi dinas Jasa Tirta tentang baik buruknya pengelolaan pariwisata kabupaten Malang.

6. Analisa data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.

Menurut Nawawi dan Hadari (1983:25) “dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung dan data atau informasi yang diperoleh harus dianalisa, berupa usaha menafsirkan untuk mengetahui maknanya serta dihubungkan dengan masalah penelitian.” Analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian dengan jawaban yang tepat.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana(2014:31-33), di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.



Gambar 1.1 Analisis Model Interaktif

(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014))

Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

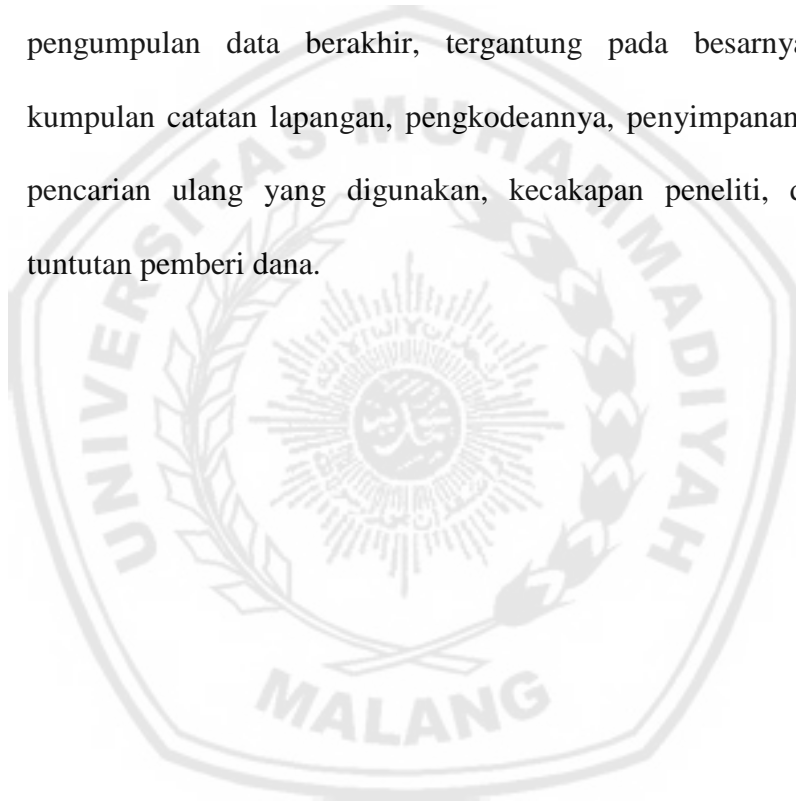
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.



G. Framework Penelitian

Gambar `1.2

Fremework Atau Kerangka Berfikir

